

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam peran kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama masa presidensi Indonesia untuk G20 pada tahun 2021-2022 merepresentasikan faktor-faktor idiosinkratik pribadi politik pemimpin negara, *influential* dan mediator. Selama masa perumusan agenda prioritas G20 Indonesia, Presiden Joko Widodo menunjukkan karakter *influential* melalui sikapnya yang mendorong kepentingan nasional terhadap poin-poin agenda prioritas G20. Sikap tersebut bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai katalisator pemulihan dunia di masa krisis multidimensional tahun 2022. Dengan penuh percaya diri, beliau menyampaikan rumusan agenda prioritas tersebut pada KTT G20 di Italia yang mengubah pandangan dunia terhadap kredibilitas Indonesia. Sepulangnya beliau dari KTT G20, Presiden Jokowi menyerukan kerjasama seluruh masyarakat, dan media untuk mensukseskan G20 serta mempublikasi G20 Indonesia secara transparan. Berkat kepercayaan dirinya tersebut, Presiden Jokowi dianggap mampu membangun kepercayaan dunia akan kredibilitas Indonesia untuk mengemban presidensi G20.

Dalam proses pengambilan keputusan pada KTT G20, Presiden Joko Widodo memperlihatkan karakter pribadi politik mediator dan *influential*. Selama berjalannya KTT G20, Presiden Jokowi memanfaatkan kemampuannya dalam bernegosiasi yang telah menjadi budaya Indonesia sejak kepemimpinan presiden pertama, Ir. Soekarno. Beliau banyak mendengarkan pandangan yang berbeda dari

masing-masing negara anggota, kemudian menyimpulkan dengan menentukan *commonality of interest* yang bukan hanya datang dari luar negeri namun juga dari dalam negeri, maka beliau mampu menjembatani perbedaan kepentingan dalam sebuah kesepakatan. Sehingga KTT G20 mampu menghasilkan *Bali Leaders Declaration* dan capaian konkret sebagai bentuk keberhasilan Presiden Jokowi mendorong kesepakatan mencapai agenda prioritas.

Di kesempatan lain, pengaruh faktor idiosinkratik *influential* Presiden Joko Widodo juga teridentifikasi terhadap hubungan antar negara anggota G20. Selama masa presidensi G20, Presiden Jokowi mampu mendorong kerjasama baru dalam pertemuan bilateral dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Turki, dan Uni Eropa. Pertemuan bilateral tersebut menghasilkan kerjasama di berbagai bidang baik teknologi, energi, maupun kesehatan yang mampu mempersiapkan keamanan Indonesia menghadapi krisis dimensional di masa yang akan datang. Kemudian karakter *influential* Presiden Jokowi ikut terlihat dalam upayanya meredam asumsi dunia terhadap hubungan antar negara anggota G20 yang sarat akan konflik politik, melalui diplomasi mangrove yang mampu memperlihatkan keakraban negara anggota berbincang selama memutari hutan mangrove Tahura Ngurah Rai.

Sedangkan pengaruh faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam pemenuhan tujuan bersama terlihat menunjukkan karakter mediator. Presiden Joko Widodo berhasil menjembatani tujuan bersama dengan mendorong kesepakatan dalam KTT G20 hingga menghasilkan *Bali Leaders Declaration*. Deklarasi yang mencakup bahasan dunia pasca pandemi covid-19, hingga perubahan iklim yang

berdampak pada penyusutan ekonomi, tingkat kemiskinan dunia yang meningkat, pemulihan dunia yang lambat, dan penghambatan pencapaian SDGs di berbagai negara, dianggap sebagai bukti kesuksesan presidensi G20 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menuai pujian dari berbagai pemimpin negara seperti Amerika, Perancis, dan pemimpin organisasi dunia seperti Antonio Guterres dari PBB.

Dengan begitu penelitian ini, membuktikan bahwa faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo yang mempengaruhi presidensi G20 Indonesia meliputi karakter politik *influential* dan mediator. Dengan karakter *influential* Presiden Jokowi mampu mempengaruhi pandangan negara lain terhadap Indonesia melalui kecenderungan sikap mengutamakan kepentingan nasional, kehormatan dan kedaulatan negara Indonesia. Berkat karakter *influential* ini pula, di bawah kepemimpinan Jokowi, G20 Indonesia mampu melahirkan kerjasama bilateral dan multilateral baru yang tertuang dalam capaian konkret. Sedangkan karakter mediator Presiden Jokowi mampu menjembatani perbedaan pandangan negara anggota demi mencapai tujuan bersama G20 dengan kecenderungan sikap pemimpin yang berorientasi pada perdamaian dunia. Berkat karakter mediator inilah, Presiden Jokowi mampu mendorong kesepakatan KTT G20 menghasilkan deklarasi pemimpin yang diberi nama *Bali Leaders Declaration*.

5.2 Saran

Berdasarkan peran idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam masa presidensi G20 Indonesia yang memberikan pengaruh dalam pemenuhan

kepentingan nasional, pemenuhan kepentingan bersama negara anggota G20 hingga mampu mempengaruhi hubungan antar negara, maka kinerjanya tersebut patut diberi apresiasi dan evaluasi. Sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, penelitian ini membagi saran menjadi dua jenis, sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperdalam aspek idiosinkratik pemimpin negara tidak hanya melalui kepribadian politik, melainkan pendekatan ideologi, serta kompleksitas cara pandang pribadi pemimpin.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam keistimewaan jajaran diplomat sebagai negosiator Indonesia yang dianggap unggul dalam mendengarkan dan menentukan *commonality of interest*.
3. Dalam penelitian ini teridentifikasi upaya Presiden Joko Widodo mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi situasi multi krisis dimensional yang akan datang, maka penelitian selanjutnya dapat mendalami konsistensi Indonesia mengimplementasi rangkaian kerjasama bilateral dan multilateral yang telah terjalin melalui presidensi G20 Indonesia.

5.2.2 Saran Praktis

1. Kredibilitas Indonesia di mata dunia: Masyarakat, pemerintah dan dunia usaha harus benar-benar konsisten, menjaga koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi (KISS). Jangan sampai *euphoria global* yang

menyanjung Indonesia dalam presidensi G20 menjadi beban karena ketidakmampuan menjaga kredibilitas dari dalam. Faktor-faktor seperti *good governance* (tata kelola yang baik), *good corporate governance*, dan *corruptions index* yang harus turun, *rules of law* yang harus terbukti.

2. *Good governance*: kerjasama internasional yang dihasilkan dari G20 Bali banyak menguntungkan posisi Indonesia untuk optimis memandang perubahan pada tahun 2030, jika pemerintah dapat berintegrasi dan mengesampingkan ego sektoralnya juga jika transisi kepemimpinan terus bisa berjalan dengan baik.
3. Strategi diplomasi: Indonesia perlu memperluas jalur diplomasi guna membangun *nation branding* yang lebih modern dan berorientasi pada perdagangan pasar dunia baik di bidang ekonomi, maupun pariwisata. Sehingga Indonesia tidak hanya diingat melalui sejarahnya yang aktif berperan dalam pembentukan ASEAN, GNB dan sebagainya.
4. Evaluasi berkala: dari sekian banyaknya kerjasama yang tercipta dari G20, Indonesia perlu melakukan evaluasi berkala yang dapat mengukur kerangka kerja agar kerjasama tersebut dapat berkelanjutan dan mencapai hasil yang diharapkan.